

# amandemen undang-undang dasar negara republik indonesia 1945

- Pengertian Ponstitusi
- Pengertian Undang-Undang Dasar
- Kedudukan UUD 1945
- Pembukaan UUD 1945



# Pengertian Amandemen



Amandemen berasal dari bahasa Inggris ‘to amend’ yang diartikan sebagai to make better, to remove the faults. Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagus nya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi (amandemen konstitusional) .

Konstitusi dapat diartikan sebagai peraturan dasar dan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan.

Konstitusional sangat berhubungan erat dengan amandemen karena bertujuan untuk memperbaiki sesuatu catatan atau dokumen penting suatu negara yang mencakup bentuk, struktur, prosedur, agar lebih baik dari sebelumnya.

# Dasar pemikiran perubahan UUD 1945



**Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut:**

1. UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi ditangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat.
2. Dalam UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada pemegang kekuasaan eksekutif(pemerintah), yakni kekuasaan dominan berada ditangan presiden.
3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga menimbulkan lebih dari satu tafsiran(multitafsir).
4. UUD 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.
5. Rumusan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, Pemberdayaan rakyat dan penghormatan hak asasi manusia (HAM)

# Tujuan perubahan UUD 1945



**Tujuan diadakan amandemen UUD 1945 menurut wakil ketua MPR adalah:**

- Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara
- Memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi
- Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak sesuai perkembangan HAM
- Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan secara tegas, lebih ketat dan transparan
- Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan Kesejahteraan Sosial berdasarkan kehidupan bangsa
- Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi eksistensi negara dan perjuangan mewujudkan demokrasi
- Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi kebutuhan dan kepentingan bangsa

# Prinsip-prinsip perubahan UUD 1945



MPR telah melakukan perubahan pertama UUD 1945 dilakukan pada sidang MPR pada tanggal 14-21 Oktober 1999, perubahan sidang kedua terjadi pada tanggal 7-18 Agustus 2000, perubahan ketika dilakukan pada sidang Tahunan MPR pada tanggal 1-9 November 2001 dan perubahan sidang ke empat terjadi pada sidang tahunan MPR yang berlangsung pada tanggal 1-11 Agustus 2002.

## **Prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD1945 :**

- MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu
- Masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dapat di dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan.
- Persyaratan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.
- Pembentukan mahkamah konstitusi yang mempunyai tugas untuk memeriksa mengadili dan memutus pendapat DPR tentang pelanggaran hukum.
- Presiden dalam mengangkat duta dan konsul harus memperhatikan pertimbangan dari DPR.

# Dinamika pelaksanaan UUD 1945



a. Tahun 1945-1949

pada tanggal 18 Agustus 1945 - 14 November 1945

pada tanggal 14 November 1945- 20 Desember 1949

b. Tahun 1949-1950

c. Tahun 1950-1959

pada tanggal 17 Agustus 1950

d. Tahun 1959-1965 /1966

e. Tahun 1965/1966-1998

f. Tahun 1998 sampai sekarang

# Tata urutan hukum di Indonesia



tata urutan hukum di indonesia mengalami perubahan sebelum dan sesudah Orde Reformasi sebagai berikut:

## A. Tap MPRS :

1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. UU/PERPU
4. Peraturan pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan Menteri
7. Intruksi Menteri

## B. Tap MPR

1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. UU
4. PERPU
5. PP
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah



### C. UU No.10 Tahun 2004

1. UUD 1945
2. UU/PERPU
3. Peraturan pemerintah
4. Keputusan Presiden
5. Peraturan Daerah

### D. UU No.12 Tahun 2011

1. UUD RI 1945
2. ketetapan MPR
3. UU/PERPU
4. Peraturan pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/kota